WALIKOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/284 /423.011/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN.

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bendahara Pengeluaran BLUD dan Bendahara Kaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : a. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang bertugas:

1. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpimnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran yang bertugas:
   1. menyusun RKA Unit SKPD;
   2. menyusun DPA Unit SKPD;
   3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   4. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpimnya;
   5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
   7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

9. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Unit SKPD;
10. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; dan
11. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
   1. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
   2. menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada SKPD;
   3. menyimpan seluruh penerimaan SKPD;
   4. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
   5. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
   6. menatausahakan seluruh perimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah;
   7. mempertanggungjawabkan secara adminitrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
   8. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
   9. melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu; dan
   10. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.

d. Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
   1. menerima penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) SKPD;
   2. menyimpan seluruh penerimaan UPT SKPD;

3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank;
5. menatausahakan seluruh perimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah;
6. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
7. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.

e. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
   1. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
   2. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
   3. meneriman dan menyimpan UP, GU dan TU;
   4. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
   5. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   7. melaksanakan penatausahaan pengeluaran;
   8. mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
   9. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
   10. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   11. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:

1. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
3. meneriman dan menyimpan UP, GU dan TU;
4. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. melaksanakan penatausahaan pengeluaran;
8. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara adminitrasi pengeluaran yang dikelolanya kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Unit SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
9. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang dikelolanya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
10. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas pada setiap akhir bulan.

g. Bendahara BOS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:

1. menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOS;
2. menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS;
3. mencatat penerimaan dan belanja dana BOS pada kas umum dan kas pembantu;
4. menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS;
5. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS

6. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran; dan
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
   1. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada BLUD;
   2. membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintan Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP (Uang Persediaan) kepada Pengguna Anggaran BLUD dan menyiapkan kelengkapannya
   3. menyiapkan dan membuat Laporan Bulanan BKU, Pemeriksaan Kas, Penutupan Kas dll pada setiap akhir Bulan;
   4. mencatat seluruh transaksi Penerimaan dan Pengeluaran (GU) kedalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Kas Tunai;
   5. membuat transaksi Pengeluaran Berdasarkan SP2D LS dan GU kedalam Buku Kas Umum; dan
   6. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:
   1. membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintan Pembayaran (SPM)dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP (Uang Persediaan) kepada Pengguna Anggaran BLUD dan menyiapkan kelengkapannya;
   2. mengecek, menandatangani rekapan pendapatan, menerima dan menghitung Setoran dari Loket Pembayaran kasir RSUD;
   3. membuat rekapan pendapatan harian;
   4. membuat laporan realisasi pendapatan;
   5. membuat laporan rekapitulasi pendapatan bulanan; dan
   6. melakukan rekonsiliasi Pendapatan.

l. Bendahara Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pegawai yang bertugas:

1. membuka rekening Dana Kapitasi JKN atas nama FKTP;
2. melaporkan penerimaan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan;
3. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
4. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh KPA beserta bukti transaksinya;
5. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
6. menguji ketersediaan Dana Kapitasi JKN; dan
7. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
2. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan; dan
3. Yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 284 /423.011/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NO.	UNIT KERJA/OPD	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN	PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
2.	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM
3.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
5.	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA & KEMASYARAKAT	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN DAN KEMASYARAKATAN
6.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN ADMINITRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
7.	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	KEPALA BAGIAN ADMINITRASI PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINITRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
8.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI
9.	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
10.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
11.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TK DAN SD)
13.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (SMP)
14.	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KESEHATAN
15.	RSUD dr. R SOEDARSONO	DIREKTUR RSUD dr. R. SOEDARSONO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN RSUD dr. R. SOEDARSONO
16.	UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGKETUG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KARANGKETUG
17.	UPT PUSKESMAS GADINGREJO	KEPALA UPT PUSKESMAS GADINGREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS GADINGREJO
18.	UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	KEPALA UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI
19.	UPT PUSKESMAS KEBONSARI	KEPALA UPT PUSKESMAS KEBONSARI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KEBONSARI
20.	UPT PUSKESMAS TRAJENG	KEPALA UPT PUSKESMAS TRAJENG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS TRAJENG
21.	UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	KEPALA UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS BUGUL KIDUL
22.	UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	KEPALA UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS KEBONAGUNG
23.	UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	KEPALA UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG
24.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1	2	3	4
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
27.	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
28.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATIS	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
29.	DINAS LINGKUNGAN HIDU KEBERSIHAN DAN PERTAI	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
30.	DINAS KEPENDUDUKAN D PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUN ANAK DAN KB	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
32.	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL
33.	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	PENGGUNA ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA
34.	DINAS PERINDUSTRIAN DA PERDAGANGAN	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
35.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
36.	DINAS PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN SATU PI	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
37.	DINAS PARIWISATA, PEMU DAN OLAH RAGA	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
38.	BADAN KESATUAN BANGS DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
39.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENGGUNA ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
40.	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
41.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD KOTA PASURUAN	PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
42.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
43.	BADAN PENDAPATAN DAE	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
44.	INSPEKTORAT	INSPEKTUR KOTA PASURUAN	PENGGUNA ANGGARAN INSPEKTORAT
46.	BADAN KEPEGAWAIAN DA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
47.	DINAS PERPUSTAKAAN DA KEARSIPAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
48.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
49.	DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS PERIKANAN	PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERIKANAN
50.	KECAMATAN GADINGREJO	CAMAT GADINGREJO	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN GADINGREJO
51.	KELURAHAN GADINGREJO	LURAH GADINGREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN GADINGREJO
52.	KELURAHAN KARANGKETU	LURAH KARANGKETUG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KARANGKETUG
53.	KELURAHAN RANDUSARI	LURAH RANDUSARI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN RANDUSARI
54.	KELURAHAN PETAHUNAN	LURAH PETAHUNAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PETAHUNAN
55.	KELURAHAN KRAPYAKREJ	LURAH KRAPYAKREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KRAPYAKREJO
56.	KELURAHAN BUKIR	LURAH BUKIR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BUKIR
57.	KELURAHAN SEBANI	LURAH SEBANI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SEBANI
58.	KELURAHAN GENTONG	LURAH GENTONG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN GENTONG
59.	KECAMATAN PANGGUNGR	CAMAT PANGGUNGREJO	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
60.	KELURAHAN PANGGUNGR	LURAH PANGGUNGREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PANGGUNGREJO
61.	KELURAHAN MANDARANR	LURAH MANDARANREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MANDARANREJO
62.	KELURAHAN NGEMPAKRE	LURAH NGEMPAKREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN NGEMPLAKREJO

1	2	3	4
63.	KELURAHAN TAMBAAN	LURAH TAMBAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TAMBAAN
64.	KELURAHAN MAYANGAN	LURAH MAYANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MAYANGAN
65.	KELURAHAN TRAJENG	LURAH TRAJENG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TRAJENG
66.	KELURAHAN BUGUL LOR	LURAH BUGUL LOR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BUGUL LOR
67.	KELURAHAN KANDANGSA	LURAH KANDANGSAPI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KANDANGSAPI
68.	KELURAHAN BANGILAN	LURAH BANGILAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BANGILAN
69.	KELURAHAN KEBONSARI	LURAH KEBONSARI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KEBONSARI
70.	KELURAHAN KARANGANY	LURAH KARANGANYAR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KARANGANYAR
71.	KELURAHAN PEKUNCEN	LURAH PEKUNCEN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEKUNCEN
72.	KELURAHAN PETAMANAN	LURAH PETAMANAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PETAMANAN
73.	KECAMATAN BUGUL KIDU	CAMAT BUGUL KIDUL	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
74.	KELURAHAN BUGUL KIDU	LURAH BUGUL KIDUL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BUGUL KIDUL
75.	KELURAHAN TAPAAN	LURAH TAPAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TAPAAN
76.	KELURAHAN KEPEL	LURAH KEPEL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KEPEL
77.	KELURAHAN BLANDONGA	LURAH BLANDONGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BLANDONGAN
78.	KELURAHAN BAKALAN	LURAH BAKALAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BAKALAN
79.	KELURAHAN KRAMPYANG	LURAH KRAMPYANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KRAMPYANGAN
80.	KECAMATAN PURWOREJO	CAMAT PURWOREJO	PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN PURWOREJO
81.	KELURAHAN PURWOREJO	LURAH PURWOREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PURWOREJO
82.	KELURAHAN POHJENTREK	LURAH POHJENTREK	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN POHJENTREK
83.	KELURAHAN KEBONAGUN	LURAH KEBONAGUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KEBONAGUNG
84.	KELURAHAN TEMBOKREJ	LURAH TEMBOKREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TEMBOKREJO
85.	KELURAHAN WIROGUNAN	LURAH WIROGUNAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN WIROGUNAN
86.	KELURAHAN PURUTREJO	LURAH PURUTREJO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PURUTREJO
87.	KELURAHAN SEKARGADU	LURAH SEKARGADUNG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN SEKARGADUNG

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 289 /423.011/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

NO. URU	INSTANSI/SKPD	NO	NAMA BEND TAHUN 2024	
			NAMA BEND	JABATAN BENDAHARA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	DINAS PENDIDIKAN	1.	MUHAMAD ZAINULLAH, S.Pd.I NIP. 19710403 200312 1 007 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
	BPP TK DAN SD DINAS	2.	LULUK SULISTYOWATI, A.Md NIP. 19760417 201406 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU TK & SD
	BPP SMP DINAS PENDIDIKAN	3.	DEWI MASITA NIP. 19811130 201406 2 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SMP
		4.	TRI PUTRANTI IMA PUSPITA DEWI NIP. 19860712 202012 2 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN BUGUL KIDUL I
		5.	IKA PUSPITA SARI, S.Pd NIP. 19870625 201903 2 003 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN BUGUL KIDUL II
		6.	AGUS PUJO SASONGKO, S.Pd NIP. 19880728 201903 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN KRAMPYANGAN
		7.	SITI MUYASSAROH, S.Pd NIP. 19941103 202012 2 010 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN TAPAAN 1
		8.	NOURON NAZILAH, S.Pd NIP. 19951029 201903 2 004 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN TAPAAN 2
		9.	BALYA ARIFUDIN, S.Pd NIP. 19900814 201903 1 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN BAKALAN
		10.	NIKMATUL IZZAH, S.Pd NIP. 19960125 202321 2 021 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SDN BLANDONGAN
		11.	DESY MARSANTI, S.Pd.SD NIP. 19821208 202321 2 017 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SDN KEPEL
		12.	NUR LAILATUR ROHMAH, S.Pd. SD NIP. 19870729 200904 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN PURUTREJO I
		13.	NUR ANISAH NIP. 19830607 201406 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA BOS SDN PURUTREJO II
		14.	WAHYU AGUNG SETIAWAN, S.Pd. NIP. 19870822 201903 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN KEBONAGUNG
		15.	SUTIM MINARSIH, S.Pd. SD NIP. 19720402 199308 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	BENDAHARA BOS SDN PURWOREJO 1
		16.	NANIK FARIDA, S.Pd NIP. 19660510 198703 2 011 Pembina Tk. I (IV/b)	BENDAHARA BOS SDN PURWOREJO III
		17.	RIFKI OKTAVIANI, S.Pd NIP. 19931016 202012 2 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN TEMBOKREJO I
		18.	ENGKY AGUS PRAMUDIANTORO, S.P NIP. 19750816 200904 1 001 Penata (III/c)	BENDAHARA BOS SDN TEMBOKREJO II
		19.	ICCA NURIKA LALITA NIP. 19870308 200904 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN WIROGUNAN

1	2	3	4	5
		20.	SITI ALIYAH, S.Pd NIP. 19851003 201903 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN SEKARGADUNG
		21.	ENY WAHYUNI, S.Pd NIP. 19710923 201001 2 003 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN POHJENTREK I
		22.	SUPARMI, S.Pd NIP. 19710707 201101 2 003 Penata (III/c)	BENDAHARA BOS SDN POHJENTREK II
		23.	HARUM MUSTIKANINGSIH, S.Pd.SD NIP. 19860323 201903 2 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN BUKIR
		24.	SUPARTO, S.Pd NIP. 19670814 198904 1 001 Pembina (IV/a)	BENDAHARA BOS SDN KRAPYAKREJO I
		25.	NURIWATI, S.Pd.SD NIP. 19850103 200904 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN KRAPYAKREJO II
		26.	BHERNA ANISA WIJAYANTI, S.Pd.SD NIP. 19850420 201101 2 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN KARANGKETUG I
		27.	AHMAD FAUZI, S.Pd NIP. 19860409 201101 1 012 Penata (III/c)	BENDAHARA BOS SDN KARANGKETUG II
		28.	SASI FAIZAH, S.Pd NIP. 19770821 202321 2 002 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SDN KARANGKETUG III
		29.	NUR KHILMI, S.Pd NIP. 19900212 202321 1 014 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SDN PETAHUNAN I
		30.	LIA SAFITRI, S.Pd NIP. 19940311 202321 2 029 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SDN PETAHUNAN II
		31.	DEWI LULUK CHAROMAH, S.Pd NIP. 19720613 200801 2 010 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN SEBANI
		32.	DINA NOVITA PURNAMANINGSIH, S.P NIP. 19841124 201101 2 013 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN GENTONG
		33.	FATMAWATI, S.Pd NIP. 19671004 200701 2 015 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN TRAJENG 1
		34.	UCIK HIDAYATI, S.Pd. SD NIP. 19870315 201903 2 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN TRAJENG 2
		35.	HINDUN HIDAYATI, S.Pd NIP. 19780511 200801 2 024 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA BOS SDN GADINGREJO I
		36.	JIAMINAH, S.Pd.SD NIP. 19721211 200604 2 011 Penata (III/c)	BENDAHARA BOS SDN GADINGREJO II
		37.	NUR ISTIQOMAH, S.Pd NIP. 19941009 201902 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN RANDUSARI
		38.	SURIFAH, S.Pd NIP. 19691215 200701 2 014 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA BOS SDN BANGILAN
		39.	ROBIAH, S.Pd.SD NIP. 19680621 199109 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	BENDAHARA BOS SDN PEKUNCEN
		40.	R. FARIDA RAHMAYANTI, S.Pd NIP. 19910313 201903 2 017 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN KARANGANYAR
		41.	KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd.I NIP. 19860628 201903 2 007 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN NGEMPLAKREJO
		42.	EKA PURNAMASARI, S.Pd NIP. 19750207 200904 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN KEBONSARI

1	2	3	4	5
		43.	SULASTRI, S.Pd NIP. 19711112 200012 2 002 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA BOS SDN PETAMANAN
		44.	DESY NURMAYANTI, S.Pd. NIP. 19891227 202321 2 027 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SDN KANDANGSAPI I
		45.	DWI LESTARI, S.Pd. NIP. 19890603 201903 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN KANDANGSAPI II
		46.	NUR LAILA ROMADHANI, S.Pd NIP. 19910328 202221 2 013 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SDN BUGUL LOR
		47.	ACHMAD SIROD JUDDIN, S.Pd. NIP. 19810303 200904 1 003 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SDN PANGGUNGREJO
		48.	RISTIN MIVAFARLIAN, S.Pd NIP. 19920519 201903 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN MANDARANREJO I
		49.	MASLUKHA, S.Pd NIP. 19911121 201903 2 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SDN MANDARANREJO II
		50.	NENENG FAUZIAH, S.Pd NIP. 19851106 201001 2 033 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA BOS SMPN 1
		51.	HENDRO JAYALAKSANA, S.Pd NIP. 19680720 199103 1 011 Pembina (IV/a)	BENDAHARA BOS SMPN 2
		52.	ANIES LUSIANA, S.Pd NIP. 19800226 201001 2 012 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA BOS SMPN 3
		53.	SUCIANI, S.Pd NIP. 19930212 201903 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SMPN 4
		54.	INTAN BAKTI SETIAWAN NIP. 19850302 201001 1 017 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA BOS SMPN 5
		55.	MAMIK AGUSTINI, S.Si NIP. 19800809 201101 2 006 Penata (III/c)	BENDAHARA BOS SMPN 6
		56.	YUANITA FIBRIYANTI, M.Pd. NIP. 19840212 200904 2 003 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA BOS SMPN 7
		57.	DAYU SUMANTORO, S.Pd.I NIP. 19881015 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SMPN 8
		58.	WAHYU HARIYONO, S.Kom. NIP. 19880602 202221 1 001 Ahli Pertama / IX	BENDAHARA BOS SMPN 9
		59.	YULI PRIHATINI, S.Pd NIP. 19800703 201101 2 003 Penata (III/c)	BENDAHARA BOS SMPN 10
		60.	DONI SETIAWAN, S.Pd NIP. 19950111 201903 1 001 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA BOS SMPN 11
		61.	SUSIANA, S.Pd.AUD NIP. 19700910 201212 2 001 Penata (III/c)	BENDAHARA BOS UPT TK PEMBINA 1 BUGUL KIDUL
		62.	BAROR MASFUFAH, S.Pd. NIP. 19671123 201212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA BOS UPT TK PEMBINA 1 PURWOREJO
2.	DINAS KESEHATAN	1.	WIWIN HERNAWATI NIP. 19710207 200901 2 002 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
		2.	EVI NURIYANA NIP. 19761108 200701 2 015 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN
	PUSKESMAS KARANGKETUG	2.	KHOLILI, S.Ak NIP. 19730216 200701 1 008 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

1	2	3	4	5
			ANI IRAWATI NIP. 19770514 200701 2 015 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			SITI JUNAIDAH, A.Md.Keb NIP. 19770725 201406 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			FERA FERIANTI FIRDAUS, A.Md.Keb NIP. 19930201 202012 2 012 Pengatur (II/c)	BENDAHARA BOK PUSK KARANGKETUG
	PUSKESMAS GADINGREJO	3.	SULFATUL ROHMA NIP. 19740620 200801 2 016 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			PUTRI FARADIKA, A.Md.Ak NIP. 19950322 202012 2 013 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			ANNISA FIRDAUS, S.Kep NIP. 19980429 202203 2 006 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			DHITA INDAH PUSPITA SARI, A.Md.Ak NIP. 19960122 202203 2 006 Pengatur (II/c)	BENDAHARA BOK PUSK GADINGREJO
	PUSKESMAS KANDANGSAPI	4.	ESNI TIWI ARIYATI, A.Md.Kep NIP. 19770425 200604 2 019 Penata (III/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			BAGUS ANDREAWAN, A.Md NIP. 19940609 202012 1 009 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			CHURIYANI, A.Md.Kep NIP. 19781018 200604 2 018 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			AHMAD BAIDURI, A.Md.Kom NIP. 19920502 202203 1 003 Pengatur (II/c)	BEDAHARA BOK PUSK KANDANGSAPI
	PUSKESMAS KEBONAGUNG	5.	KRISSANTY SILVIA NICA, A.Md.Kep NIP. 19850630 201001 2 025 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			YAYUK TRIANINGSIH, Amd.Keb NIP. 19891021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			ADE JELITA UMAMI, A.Md.Ak NIP. 19980616 202012 2 004 Pengatur (II/c)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			NURAIDA ASTI ALIFIANDARI, A.Md. NIP. 19931031 202203 2 002 Pengatur (II/c)	BENDAHARA BOK PUSK KEBONAGUNG
	PUSKESMAS KEBONSARI	6.	YURIKA AYU INDRIYATI, A.Md.Keb NIP. 19870927 201705 2 005 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			EMMELDAH SUPRAHESTI, A.Md.Keb NIP. 19870921 201101 2 016 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			SARTIKA, S.KM NIP. 19891111 202012 2 013 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			ANIDA MOYOKI, A.Md. NIP. 19871106 202203 2 004 Pengatur (II/c)	BEDAHARA BOK PUSK KEBONSARI
	PUSKESMAS BUGUL KIDUL	7.	PUTRI ARRY KARTIKA, S.Farm. Apt NIP. 19921222 202012 2 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			PUTRI EKA FENIA NIP. 19950701 202203 2 008 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			DEWI IRMAWATI, A.Md.Kep NIP. 19901216 201903 2 008 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			ARIK EKAWATI, A.Md.Kep. NIP. 19800421 200604 2 025 Pengatur (II/c)	BENDAHARA BOK PUSK BUGUL KIDUL

1	2	3	4	5
	PUSKESMAS TRAJENG	8.	MIDA YANUAR T, A.Md.Keb NIP. 19860122 201704 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			ITA MARTHA KURNIA, A.Md.Kep NIP. 19940330 201903 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			RISA VERASARI, A.Md.Keb NIP. 19880327 201001 2 016 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			HERRI KISWANTO, A.Md. NIP. 19890316 202203 1 003 Pengatur (II/c)	BEDAHARA BOK PUSK TRAJENG
	PUSKESMAS SEKARGADUNG	9.	KAMARUDIN NIP. 19771222 200801 1 015 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
			EKO WAHYUNI, A.Md.Keb NIP. 19740828 201905 2 001 Pengatur Muda (II/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
			IDA KUSMANING S, A.Md.Keb NIP. 19840615 201101 2 008 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA KAPITASI/JKN
			PRASASTI CITRA PERTIWI NIP. 19970830 202203 2 008 Pengatur (II/c)	BENDAHARA BOK PUSK SEKARGADUNG
3.	RSUD dr. R. SOEDARSONO	1.	SRI KARTIKAWATI NIP. 19730722 200701 2 003 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN APBD
		2.	ISTI DWI INDARWATI, A.Md NIP. 19821209 201001 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
		3.	ENI YUNIANI NIP. 19790623 200701 2 010 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
4.	DINAS PU & PR	1.	EKO PRASTIYO UTOMO, SE NIP. 198309243 200901 1 006 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
		2.	MUDJI ADIJARTO NIP. 19710518 200701 1 016 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENERIMAAN
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT	1.	ARVIAN LUVIEANTO NIP. 19840803 201001 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
		2.	ANTORO AGUS SUBRONTO NIP. 19730817 200604 1 019 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN
6.	BAPPELITBANGDA	1.	ARIFAH NIP. 19840320 201001 2 021 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
7.	DINAS PERHUBUNGAN	1.	YUSI SUSANTI, A.Md NIP. 19960614 202012 2 011 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN
		2.	JOHAN SURYANTO NIP. 19821109 200801 1 012 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN
8.	DINAS KOMINFO DAN STATISTIK	1.	ENDAH HARIANI NIP. 19830101 201001 2 003 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.	PRENAN ARGADJATOE WIDIANA NIP. 19770821 200801 1 012 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
		2.	ATHOILLAH NIP. 19850917 201406 1 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENERIMAAN
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL		HADI PRASETYO NIP. 19810718 200801 1 022 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN

1	2	3	4	5
11.	DINAS PP, PA DAN KB		SITI NURONIAH NIP. 19831129 201001 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
12.	DINAS SOSIAL		NURKHOLIS NIP. 19780928 200801 1 009 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
13.	DINAS TENAGA KERJA		NUR WULAN AGUSTIARINI NIP. 19860805 201406 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PURWIYONO NIP. 19740212 200701 1 018 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
			GATOT SARWIJI NIP. 19721020 200701 1 013 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN
15.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		ENDAH SETIJORINI NIP. 19710510 200901 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		DYAH ARUM WIDYASARI NIP. 19850701 201001 2 001 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
17.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		NOVIKA HARMAJI PUTRI NIP. 19821108 200801 2 008 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
18.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		ZAHARA FONNA, S.Sos NIP. 19811209 201101 2 007 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN
19.	PRAJA		DWI IKE MEGOWATI NIP. 19860802 200604 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
20.	BPBD		BUASAN NIP. 19720903 200901 1 003 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN
21.	SEKRETARIAT DAERAH	1.	IKA RATNAWATI NIP. 19820816 200901 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN
	BAGIAN ORGANISASI	2.	SHELLA WAHYUNING TYAS, S.STP NIP. 19950825 201908 2 001 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	BAGIAN UMUM	3.	LUQMAN KHAKIM NIP. 19770927 201001 1 001 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN
		4.	CATUR NURUL UMNI UTARI, SE NIP. 19781014 200312 2 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	BAGIAN ADM PEMERINTAHAN	5.	ANDI AGUSTIA,S.STP NIP. 19960809 201808 1 001 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	BAGIAN ADM PEREKONOMIAN	6.	AHMAD NIP. 19671201 201212 1 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	BAGIAN ADM PEMBANGUNAN	7.	ARI DWI TITISARI, A.Md NIP. 19891221 201903 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	8.	FITRIYAH ULFA, ST NIP. 19970211 202203 2 007 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	BAGIAN HUKUM	9.	RISKY DWI SETYO FAJARIANTO, SH NIP. 19910430 202203 1 004 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	BAGIAN PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN	10.	DIAH KRISNAWATI NIP. 19860213 201406 2 002 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

1	2	3	4	5
	BAGIAN ADM KERSA & KEMASYARAKATAN	11.	MOCHAMMAD CHARIS CHIZBULLOH NIP. 19830316 201406 1 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
22.	SEKRETARIAT DPRD		NURJANAH NIP. 19791105 200801 2 022 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		WHIKA PRAMUSITA NIP. 19820627 200801 2 016 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
			WIWIK KUSDI SUDARWATI NIP. 19750204 200701 2 012 Pengatur Tk I (II/d)	BENDAHARA PENERIMAAN
24.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		MARLINA SUKMAWATI DEWI, SE NIP. 19900518 202012 2 015 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
			RHEZKY RAMADHAN SHAMAD, A.Md NIP. 19820618 201001 1 022 Penata Muda Tk I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN
25.	INSPEKTORAT		NUR IHWAN, A.Md NIP. 19761107 201406 1 001 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		MOHAMAD SLAMET, SH NIP. 19780924 200801 1 010 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		TATIK FARIKHA NIP. 19810421 200801 2 016 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
28.	DINAS PERIKANAN		INDRIANI SUNSUFI, S.Pi NIP. 19950907 202012 2 016 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
29.	DINAS PERTANIAN DAN KP		KARTIKANAWA NIP. 19680720 199403 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN
			YUSRIL FATHURROHMAN, A.Md.Kom NIP. 19980331 202203 1 004 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN
30.	KECAMATAN GADINGREJO	1.	SAIKHU ANWAR NIP. 19790514 200801 1 011 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN
	KELURAHAN KRAPYAKREJO	2.	DILLY TIMORA, A.Md NIP. 19860227 202012 2 003 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN BUKIR	3.	MOCHAMMAD ROBI ABDILA, A.Md NIP. 19950816 202012 1 004 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN SEBANI	4.	MOKHAMAD RIFAI NIP. 19770904 200901 1 002 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN GENTONG	5.	AHMAD FAUZAN SHODIQIN NIP. 19760521 200701 1 011 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN GADINGREJO	6.	ABDUL ROHMAN NIP. 19700909 200312 1 003 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN RANDUSARI	7.	ARIANTO HARAHAP NIP. 19830422 201406 1 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN KARANGKETUG	8.	SULTON ARIF DARMAWAN, A.Md NIP. 19970130 202012 1 003 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN PETAHUNAN	9.	DIAN ANGGRAENI NIP. 19850922 201001 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

1	2	3	4	5
31.	KECAMATAN PANGGUNGREJO	1.	ADY SURACHMAN NIP. 19820506 200801 1 016 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN
	KELURAHAN NGEMPLAKREJO	2.	MOKHAMAD IRFAN NIP. 19730821 200701 1 013 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN TAMBAAN	3.	HASANUDIN NIP. 19860303 201406 1 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN PETAMANAN	4.	ARIES YULIANTO NIP. 19800714 200801 1 018 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN BUGUL LOR	5.	GAGUK EKO PRATIKTO NIP. 19801230 200801 1 015 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN MAYANGAN	6.	NANING SHOBAH NIP. 19830518 200901 2 004 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN TRAJENG	7.	MUSRIFAH NIP. 19730111 200901 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN BANGILAN	8.	MOHAMAD JUPRI NIP. 19721117 200701 1 007 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN KEBONSARI	9.	LU'LUIL MAKNUN NIP. 19820501 200901 2 007 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN KARANGANYAR	10.	TITIK SETIYOWATI NIP. 19701115 200312 2 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN KANDANGSAPI	11.	YOFIE SAGITHA NIP. 19810805 200901 2 005 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN PEKUNCEN	12.	JETTY NOVIANETTA NIP. 19711109 200701 2 006 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN PANGGUNGREJO	13.	SAIDAH WAROH NIP. 19680113 200212 2 002 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN MANDARANREJO	14.	RUSDIAN TEGUH WICAKSONO NIP. 19850413 200901 1 002 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
32.	KECAMATAN BUGUL KIDUL	1.	RIKIE SULASTRI NIP. 19810112 200311 2 001 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
	KELURAHAN BAKALAN	2.	ARIS ANDIKA YUDHA, A.Md NIP. 19870115 202012 1 008 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN KRAMPYANGAN	3.	WIDA SAKTI FIRLANA SURYA NIP. 19750119 200801 2 006 Pengatur Tk. I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN BLANDONGAN	4.	FERISA KURNIAWAN, A.Md NIP. 19860606 202012 1 006 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN KEPEL	5.	MOCH DENY IRVANDI, A.Md NIP. 19970122 202012 1 006 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN BUGUL KIDUL	6.	DEAN RIZKY FIRMANSYAH, A.Md NIP. 19951210 202012 1 006 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN TAPAAN	7.	EVELYNE VIVIE HANDAYANI NIP. 19820301 200312 2 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
33.	KECAMATAN PURWOREJO	1.	KHUSEN NIP. 19850922 201001 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN

1	2	3	4	5
	KELURAHAN POHJENTREK	2.	INDANA ZULFIYAH, Amd.Kom NIP. 19980322 202012 2 004 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN WIROGUNAN	3.	SITI SAFINAH NIP. 19850922 201001 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN TEMBOKREJO	4.	MUSLIKH NIP. 19850922 201001 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN PURUTREJO	5.	HENNY ANSADETA, A.Md. Kom NIP. 19850116 202012 2 003 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN KEBONAGUNG	6.	ASRUR ARIYANTO NIP. 19850819 201406 1 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN PURWOREJO	7.	MUHAMAD HABIB, A.Md NIP. 19951102 202012 1 010 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
	KELURAHAN SEKARGADUNG	8.	PENI PRASTIWI NIP. 19850922 201001 2 001 Pengatur (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF